

## EDITORIAL

## Narasi Basi Hantu PKI

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu muncul dalam dua keadaan ini: menjelang peringatan tragedi 30 September 1965 dan musim pemilihan umum. Sehingga ada kesan kuat isu kebangkitan PKI ini sarat kepentingan politik, terutama untuk melorotkan pamor pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi, apa pun motifnya, narasi yang berulang-ulang seperti ini menyesatkan dan merupakan tindakan pembodohan publik.

Isu mengenai PKI kembali muncul baru-baru ini. Hal ini berawal dari tuduhan wartawan Hasril Chaniago kepada Arteria Dahlan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—partai penyokong Jokowi—dalam acara *Indonesia Lawyer Club* di TV One pada 8 September lalu. Hasril menuding Arteria Dahlan cucu kader PKI. Isu ini kian hangat setelah Gatot Nurmantyo mengaku dicopot sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi karena mengeluarkan perintah *nonson* bareng film gerakan 30 September 1965. Gatot kini deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang banyak diisi tokoh oposisi terhadap Jokowi.

Masih gentayangnya hantu komunisme di Indonesia karena masih ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan politik dan ekonomi dari maraknya stigma ini. Apalagi ada sebagian masyarakat yang masih percaya pada isu kebangkitan PKI. Mereka yang paling mudah tersengat adalah kelompok kanan yang memiliki sejarah panjang melawan komunisme. Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilansir kemarin, dari 1.203 responden, sebanyak 14 persen masih percaya akan isu kebangkitan PKI tersebut.

Pertanyaan besarnya adalah sampai kapan isu ini terus diproduksi? Sebagai sebuah partai, PKI sudah lama mati. Tapi memorinya sebagai hantu yang mengerikan terus-menerus ditampilkan di hadapan publik. Pada era saat ini yang penuh dengan informasi sesat dan hoaks, upaya manipulasi publik dengan isu seperti itu memang jauh lebih mudah. Orang-orang yang mengambil keuntungan dari isu kebangkitan PKI ini tampaknya meyakini bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Celakanya, setelah 20 tahun lebih reformasi bergulir di negeri ini, pemerintah dan para aparatnya masih kerap menggunakan hantu PKI ini sebagai sistem kontrol yang ampuh. Sebut saja tindakan razia buku kiri dan pembubaran diskusi, seminar, atau pemutaran film tentang tragedi 1965. Ada kesan kuat pemerintah melakukan tindakan itu untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa mereka pun anti-PKI. Tindakan memilih bermain aman seperti ini tentu sangat disesalkan.

Ketakutan akan bangkitnya PKI adalah komoditas politik yang seharusnya sudah dikubur puluhan tahun lalu. Sebagai ideologi, komunisme di seluruh muka bumi sudah lumpuh. Tak ada alasan untuk mencemaskan kebangkitannya. Karena itu, upaya menghentikan narasi kebangkitan PKI harus diawali komitmen bersama para elite politik untuk mengakhiri permainan politik menggunakan stigma ini. Ketimbulan mengurus isu ancaman PKI yang merupakan ilusi semata, mereka sebaiknya memikirkan bersama melawan hantu yang sesungguhnya tengah dihadapi saat ini: Covid-19. ■

## 1965: Kesaksian Kirdjomuljo

Seno Gumira Ajidarma  
Panajournal.com

Kirdjomuljo (1930-2000) adalah penyair dan penulis naskah drama produktif sebelum berhenti pada 1973, ketika lebih tertarik membongkar rahasia sejarah Majapahit-Mataram dengan metode sendiri. Tidak mendapat pengakuan dari sudut pandang ilmu sejarah, Kirdjomuljo bukannya tidak menyumbang kepada penyiaran sejarah.

Dalam satu dari hanya dua novelnya, *Tjahaja di Mata Emi* (1968), Kirdjomuljo memberi kesaksian tentang apa yang berlangsung di Jawa dan Bali setelah 30 September 1965. Fiksi bukan catatan sejarah, tapi bisa menjadi sumber sejarah jika memenuhi persyaratan dalam metodologi ilmu sejarah. Dalam gubahan susastra terdapat unsur pengalaman, imajinasi, dan nilai, yang sebagai pendekatan kreatif terhadap *historical truth*, menampilkan semangat zaman (Kuntowijoyo, 2019: 32; 2008: 183).

Kisahny tentang prostitusi, termasuk indikasi *wafficking*: perempuan maupun gadis-gadis di bawah umur dijebak, jika perlu dipaksa, untuk menjadi aset dalam perdagangan seks. Alur dimulai pada 30 September 1965, ketika pelukis Herman turun dari kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta.

Bersama Herman, pembaca menyaksikan "di depan gedung Telekomunikasi penuh tentara bersenjata lengkap dalam keadaan siap bertempur" yang merupakan fakta standar peristiwa "G30S". Namun,



sejak akhir November 1965 di dalam novel, dengan konteks tahun terbit 1968, pengalaman tokoh Herman sebagai ungkapan tertulis boleh dibidang subversif: "... ia merangkak-rangkak dalam suasana jelas tetapi kalut, di mana gerakan-gerakan pembersihan mulai dijalankan" (h. 6). Pelebaran dari penulis.

Dalam perjalanan ke Bali, di Negara, bus dihentikan "sepasukan tentara bersama-sama massa yang berpakaian hitam/sangkur-sangkur terhuwah yang sengit penuh kecuangan/ Soalnya kini ia belum tahu siapakah gerombelan yang mencepat itu?" (h. 7). Orang-orang yang diturunkan, termasuk Herman, dibagi ke dalam dua ruang. Setelah beberapa jam, di ruang depan ada yang dilepas, tapi Herman dimasukkan ke ruang belakang, meski mengaku sebagai pelukis yang sudah lama tinggal di Bali.

"Apa PKI tidak punya pelukis? Masuk ke belakang, cepat!" (h. 8). Kemudian, kesaksian Herman: "Dari jendela yang sedikit terbuka itu tampak beberapa kebakaran dan

suara-suara riuh barisan-barisan peronda. Entah sedang mengapa mereka. Hanya tiba-tiba terdengar dari kejauhan orang mengaduh dan melolong dan kemudian diam. Terdengar lagi orang lain yang melolong panjang, kemudian diam" (h. 8).

Ruangan terus diisi sampai penuh sesak. "Seseorang telah berdarah di keningnya, seorang lagi menyeret kakinya." Herman menyimpulkan, "Kini pembersihan massal sudah berlangsung. Mungkin mereka mengadakan perlawanan hingga tindakan-tindakan kekerasan terpaksa dijalankan" (h. 9). Herman menyaksikan lewat jendela kaum perempuan mengalami hal yang sama.

Dituturkan, Herman mendengar kabar di Negara paling banyak korban, "... menurut ukuran besarnya daerah. Soalnya memang waktu menjelang tepat akhir November, rapat gelap di Tegallabang digerebeg, mereka mengadakan perlawanan senjata hingga menyebabkan seorang dari angkatan bersenjata gugur. Massa yang sudah lama menekan dendam, meluap dan melanda daerah-daerah merah, hingga sebagian

besar desa-desa hancur sama sekali" (h.11).

Perasaan Herman mungkin mewakili banyak orang: "Beberapa kali ia terpaksa ikut serta dalam rombongan pelaksanaan penumpasan. Herman tidak mampu mengerjakan itu, dan ia hanya ikut serta dalam rombongan kemudian tinggal di belakang di saat-saat yang ditentukan. Ia hanya bisa mendengar-dengar dari kejauhan, itu pun baginya sudah merupakan tekanan batin yang sampai sekarang sulit dihapuskan" (h. 11).

Latar politis itu terdapat di Bab 1, dalam 11 bab berikutnya muncul minimal, misalnya suami Yuliati, protagonis novel, penggerak golongan merah "meninggal dibunuh oleh rakyat" (h. 26). Selebihnya adalah jatuh-bangunnya perempuan dalam jebakan dan perlawanan terhadap cak-pelacuran, yang mendapatkan pasar dari kelahiran kelas baru pasca-kejadian "bersejarah" (h. 13).

Kirdjomuljo telah menepis anggapan bahwa semasa Orde Baru tidak ada penulis yang berani mengungkap pembantaian di Jawa dan Bali dengan empati kepada korban. Siapa pun yang menjadi korban. ■